



**KEPALA DESA JOHOREJO
KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN KEPALA DESA JOHOREJO
NO. 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD)
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA JOHOREJO
KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL**
Alamat : Jl. Asri RT. 01 RW. 01 Dusun Joho Krajan Desa Johorejo
Email : pemdesjohorejo@gmail.com Kode Pos 51355



KEPALA DESA JOHOREJO
KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA JOHOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT DD) TAHUN ANGGARAN 2022
DI DESA JOHOREJO KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JOHOREJO,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 pada Pasal 5 ayat (4a) tentang Penggunaan Dana Desa untuk Program Perlindungan Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Desa paling Sedikit 40 % (Empat Puluh Persen);
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa pada pasal 32 ayat (1a) tentang Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk Program Perlindungan Sosial berupa BLT Desa;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 1 Tahun 2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Musyawarah Desa Khusus Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2022 Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal;
 - d. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 28 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai bahwa "Pengantian KPM BPNT sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan karena KPM BPNT memiliki kepesertaan ganda";
 - e. Bahwa dalam perkembangannya setelah penetapan Perkades Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 Di Desa Johorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal terdapat nama-nama yang ganda dengan penerima BPNT dan PKH dari Kementerian Sosial;
 - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun

Anggaran 2022 Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
28. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1497);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
33. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
35. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
36. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
37. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
39. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
40. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 41. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
 42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
 43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
 44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289);
 45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 46. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
 47. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 9 Seri A No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 148); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 - 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2);
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017 Nomor 10 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal nomor 161);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 83 Seri A Nomor);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 2);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 7 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
54. Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 10 Seri E No. 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);
55. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);
56. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 53 Seri E No. 47) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);
57. Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);
58. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
59. Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 31 seri E No 27);

60. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
61. Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standarisasi Beaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 72 Seri E No. 45);
62. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 Nomor 80 Seri E no 47);
63. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi dana Desa di Kabupaten Kendal Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No. 49) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 80);
64. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 5) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal No. 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal No.5 Tahun 2017 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30);
65. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
66. Peraturan Bupati Kendal No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2);
67. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 6) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal No 31 tahun 2018 Tentang Perubahan Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 31);
68. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita

Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 13);

69. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
70. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 81);
71. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 13);
72. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
73. Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 69);
74. Peraturan Bupati Kendal No. 80 Tahun 2020 tentang Standarisasi Biaya Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 80);
75. Peraturan Bupati Kendal Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 96);
76. Peraturan Bupati Kendal Nomer 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 74);
77. Peraturan Bupati No 4 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 4);
78. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 9);
79. Peraturan Bupati No 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 17);
80. Peraturan Bupati No 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017

tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lain – lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);

81. Peraturan Bupati Kendal Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 85 Tahun 2020 tentang Analisa Harga satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 43);
82. Peraturan Bupati No 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 53);
83. Peraturan Bupati No 62 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Kabupaten Kendal Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 62);
84. Peraturan Desa Johorejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Desa Johorejo (Lembaran Desa Johorejo Tahun 2017 Nomor 1);
85. Peraturan Desa Johorejo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Johorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal (Lembaran Desa Johorejo Tahun 2018 Nomor 5);
86. Peraturan Desa Johorejo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Johorejo Tahun 2020 Nomor 5);
87. Peraturan Desa Johorejo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Johorejo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Johorejo Tahun 2021 Nomor 3);
88. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Johorejo Tahun 2022 (Lembaran Desa Johorejo Tahun 2021 Nomor 5); dan
89. Peraturan Kepala Desa Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Johorejo Tahun 2022 (Berita Desa Johorejo Tahun 2021 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD) TAHUN ANGGARAN 2022 DI DESA JOHOREJO KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Sasaran Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) berdasarkan kriteria ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 pasal 33, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
1. Keluarga Miskin atau tidak mampu yang berdomisili didesa bersangkutan dan diprioritaskan untuk Keluarga yang termasuk dalam kategori Kemiskinan Ekstrem;
 2. Keluarga Miskin yang kehilangan Mata Pencaharian;
 3. Keluarga Miskin yang mempunyai anggota keluarga yang

- rentan sakit menahun/kronis;
4. Keluarga Miskin Penerima Jaring Pengaman Sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan / atau dari APBN.
 5. Keluarga Miskin yang terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan belum menerima bantuan; atau
 6. Rumah Tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

- KETIGA** : Jangka waktu dan besaran penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) sebagai berikut:
- a. Besaran BLT-Dana Desa setiap bulan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga; dan
 - b. Masa penyaluran BLT-Dana Desa dibagikan setiap bulan selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari 2022.
- KEEMPAT** : Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (*cashless*) setiap bulan melalui Bank Pemerintah.
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan kepala Desa ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal
- KEENAM** Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Johorejo.

Ditetapkan di : Desa Johorejo
Pada tanggal : 4 Februari 2022



Diundangkan di Desa Johorejo
Pada tanggal : 4 Februari 2022



BERITA DESA JOHOREJO TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN : Peraturan Kepala Desa Johorejo
 Nomor : 2 Tahun 2022
 Tanggal : 4 Februari 2022
 Tentang : Perubahan Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun
 2022 tentang Penetapan Keluarga Penerima
 Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana
 Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2022

**DAFTAR NAMA
 KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD) TAHUN ANGGARAN 2022
 DESA JOHOREJO
 KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL**

NO	NIK	NAMA	JENIS KELAMIN (L / P)	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH KELUARGA
1.	3324111708010003	SYAFIQ FAHMI	L	17-08-2001	Dsn Joho Krajan RT. 01 RW. 01	Belum bekerja	1
2.	3324110807630001	AH. YUSUF	L	08-07-1963	Dsn Joho Krajan RT. 01 RW. 01	Tidak bekerja	2
3.	3324116105510001	SARI' AH	P	21-05-1951	Dsn Joho Krajan RT. 01 RW. 01	Petani/Pekebun	2
4.	3324110607000004	MUHAMMAD SOBIRIN	L	06-07-2000	Dsn Joho Krajan RT. 01 RW. 01	Belum bekerja	1
5.	332411010590002	SUGENG	L	10-10-1959	Dsn Joho Krajan RT. 01 RW. 01	Buruh harian lepas	1
6.	3324112509540001	SUNARDI	L	25-09-1954	Dsn Joho Krajan RT. 01 RW. 01	Petani	4
7.	3324116309520001	JUYATI	P	23-09-1952	Dsn Joho Krajan RT. 01 RW. 01	Petani/Pekebun	1
8.	3324110202600001	SUMALI	L	02-02-1960	Dsn Joho Krajan RT. 01 RW. 01	Petani/Pekebun	3
9.	3324146108620001	SUTIAH	P	21-08-1962	Dsn Joho Krajan RT. 01 RW. 01	Mengurus rumah tangga	1
10.	3324113112610020	TRUBUS	L	31-12-1961	Dsn Joho Krajan RT. 01 RW. 01	Wiraswasta	2
11.	3324116004530001	WAHYUNI	P	20-04-1953	Dsn Joho Krajan RT. 01 RW. 01	Buruh harian lepas	2
12.	3324111508620002	SULAEMI	L	15-08-1962	Dsn Joho Krajan RT. 02 RW. 02	Buruh harian lepas	1
13.	3324182508730001	SEDI	L	25-08-1973	Dsn Joho Krajan RT. 02 RW. 01	Petani/Pekebun	3
14.	3324115303630001	SRI SLAMET	P	13-03-1963	Dsn Joho Krajan RT. 02 RW. 01	Petani/Pekebun	2
15.	3324115106700002	SITI AMINAH	P	11-06-1970	Dsn Joho Krajan RT. 02 RW. 01	Petani/Pekebun	4
16.	3324111511810001	MAHROWI	L	15-11-1981	Dsn Joho Krajan RT. 03 RW. 01	Tidak bekerja	1
17.	3324110709670001	ABDUL MU IS	L	07-09-1967	Dsn Joho Krajan RT. 03 RW. 01	Wiraswasta	2
18.	3324116008750002	DEDE SOLIHAT	P	20-08-1975	Dsn Joho Krajan RT. 03 RW. 01	Wiraswasta	3

NO	NIK	NAMA	JENIS KELAMIN (L / P)	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH KELUARGA
19.	3324115208550003	SUTIMAH	P	12-08-1955	Dsn Joho Krajan RT. 03 RW. 01	Mengurus rumah tangga	2
20.	3324114204680004	ROKHANAH	P	02-04-1968	Dsn Joho Krajan RT. 03 RW. 01	Mengurus rumah tangga	2
21.	3324110812780002	AHMAD ZAMRONI	L	08-12-1978	Dsn Joho Krajan RT. 03 RW. 01	Petani/Pekebun	4
22.	3324112905760002	SUYONO	L	29-05-1976	Dsn Joho Krajan RT. 03 RW. 01	Wiraswasta	3
23.	3324111505530003	NGARIP	L	15-05-1953	Dsn Joho Krajan RT. 03 RW. 01	Petani/Pekebun	1
24.	3324115206930002	NURUL KHAERUNNIMAH	P	12-06-1993	Dsn Joho Krajan RT. 03 RW. 01	Mengurus rumah tangga	2
25.	3324114905640001	SARTINI	P	09-05-1964	Dsn Joho Krajan RT. 04 RW. 01	Petani/Pekebun	2
26.	3324110808900002	AGUS SURYADI	L	08-08-1990	Dsn Joho Krajan RT. 04 RW. 01	Wiraswasta	3
27.	332411011710006	HADI MUKLIS	L	10-11-1971	Dsn Joho Krajan RT. 04 RW. 01	Tidak bekerja	1
28.	3324115707790002	PONIYAH	P	17-07-1979	Dsn Joho Krajan RT. 04 RW. 01	Petani/Pekebun	2
29.	3324111206730007	SUJADI	L	12-06-1973	Dsn Joho Krajan RT. 04 RW. 01	Wiraswasta	3
30.	3324111001540001	SUPANI	L	10-01-1954	Dsn Joho Krajan RT. 04 RW. 01	Petani/Pekebun	3
31.	3324115008410002	MUSTIMAH	P	10-08-1941	Dsn Joho Krajan RT. 04 RW. 01	Petani/Pekebun	1
32.	3324115010500002	SUTRI	P	10-10-1950	Dsn Joho Krajan RT. 04 RW. 01	Petani/Pekebun	4
33.	3324110501630001	MARYUN	L	05-01-1963	Dsn Joho Krajan RT. 04 RW. 01	Wiraswasta	2
34.	3324114407690003	ASMIAH	P	04-07-1969	Dsn Joho Krajan RT. 04 RW. 01	Petani/Pekebun	4
35.	3324112603510001	SUTOYO	L	26-03-1951	Dsn Joho Krajan RT. 04 RW. 01	Petani/Pekebun	4
36.	3324113009580001	ADAM	L	30-09-1958	Dsn Joho Krajan RT. 04 RW. 01	Petani/Pekebun	5
37.	3324114911970001	DIAN RAFIURRUTAB	P	09-11-1957	Dsn Joho Krajan RT. 04 RW. 01	Mengurus rumah tangga	5
38.	3324111507760006	KALIMAN	L	15-07-1966	Dsn Joho Krajan RT. 04 RW. 01	Buruh harian lepas	5
39.	3324100608850002	ABDUL MUTOLIB	L	09-08-1985	Dsn Joho Krajan RT. 04 RW. 01	Buruh tani	3
40.	332411201740002	RUSMANTO	L	12-01-1974	Dsn Joho Krajan RT. 05 RW. 01	Buruh harian lepas	3
41.	3324110509570001	JAMBARI	L	05-09-1957	Dsn Joho Krajan RT. 05 RW. 01	Petani/Pekebun	2
42.	3324112606610001	SUWADI	L	26-06-1961	Dsn Joho Krajan RT. 05 RW. 01	Petani/Pekebun	2
43.	3324111603780001	SUTAMAN	L	16-03-1978	Dsn Joho Krajan RT. 05 RW. 01	Petani/Pekebun	2
44.	3324115510630002	WARTINI	P	15-10-1963	Dsn Joho Krajan RT. 05 RW. 01	Petani/Pekebun	4
45.	3324111010560002	KASWAN	L	10-10-1956	Dsn Joho Krajan RT. 05 RW. 01	Petani/Pekebun	3
46.	3324111506960001	MUHAMMAD AGUS SUPRIYANTO	L	15-06-1996	Dsn Joho Krajan RT. 05 RW. 01	Petani/Pekebun	3
47.	3324116005540002	TUMINI	P	20-05-1954	Dsn Joho Krajan RT. 05 RW. 01	Petani/Pekebun	1
48.	3324116007610001	TUKINI	P	20-07-1961	Dsn Joho Krajan RT. 05 RW. 01	Petani/Pekebun	2
49.	3324115809520001	YAKMI	P	18-09-1952	Dsn Joho Krajan RT. 05 RW. 01	Petani/Pekebun	1

NO	NIK	NAMA	JENIS KELAMIN (L / P)	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH KELUARGA
50.	3324114804730002	NUR ISTIKANAH	P	14-06-1973	Dsn Joho Krajan RT. 05 RW. 01	Buruh harian lepas	4
51.	3324110108930004	MUH. IRKHABUL LUBAH	L	01-08-1993	Dsn Joho Krajan RT. 05 RW. 01	Buruh harian lepas	3
52.	3172015509730002	NGATEMI	P	15-09-1973	Dsn Joho Krajan RT. 05 RW. 01	Mengurus rumah tangga	4
53.	3324110606530003	SLAMET RIYADI	L	06-06-1953	Dsn Joho Krajan RT. 05 RW. 01	Wiraswasta	1
54.	3324115303540001	KEMISAH	P	13-03-1954	Dsn Joho Krajan RT. 01 RW. 02	Buruh harian lepas	1
55.	3324114107520002	SUTIMAH	P	01-07-1952	Dsn Joho Krajan RT. 01 RW. 02	Buruh harian lepas	1
56.	3324114611910001	NUR A'ISAH	P	06-11-1991	Dsn Joho Krajan RT. 01 RW. 02	Wiraswasta	2
57.	3324117112570023	KOMDIYAH	P	31-12-1952	Dsn Joho Krajan RT. 01 RW. 02	Petani/Pekebun	2
58.	3324110203640001	KASNADI	L	02-03-1964	Dsn Joho Krajan RT. 01 RW. 02	Petani/Pekebun	4
59.	3324112107610002	NGADI	L	21-07-1961	Dsn Joho Krajan RT. 01 RW. 02	Petani/Pekebun	3
60.	3324114706620001	SOFROTUN	P	07-06-1962	Dsn Joho Krajan RT. 01 RW. 02	Petani/Pekebun	1
61.	3324110801560001	ZAENURI	L	08-01-1956	Dsn Joho Krajan RT. 01 RW. 02	Petani/Pekebun	1
62.	3324111210860001	ZAHRUL ABIDIN	L	12-10-1986	Dsn Joho Krajan RT. 01 RW. 02	Petani/Pekebun	3
63.	3324117108920002	FATIMATUL AWALLIAH	P	31-08-1992	Dsn Joho Krajan RT. 01 RW. 02	Wiraswasta	1
64.	3324116810580001	RUSMI	P	28-10-1958	Dsn Joho Krajan RT. 02 RW. 02	Buruh harian lepas	2
65.	3324114501600003	NGANTI	P	05-01-1950	Dsn Joho Krajan RT. 02 RW. 02	Buruh harian lepas	3
66.	3324112012800001	MUSTAKHIM	L	20-12-1980	Dsn Joho Krajan RT. 02 RW. 02	Petani/Pekebun	2
67.	3324115103400003	SUTINAH	P	11-03-1940	Dsn Joho Krajan RT. 02 RW. 02	Petani/Pekebun	1
68.	3324115212530001	SURIYAH	P	12-12-1953	Dsn Joho Krajan RT. 02 RW. 02	Petani/Pekebun	3
69.	3324116108460002	HJ. AMUAH	P	21-08-1946	Dsn Joho Krajan RT. 02 RW. 02	Petani/Pekebun	1
70.	3324115710670001	SUJIATI	P	17-10-1967	Dsn Joho Krajan RT. 02 RW. 02	Wiraswasta	1
71.	3324110611630001	ISMAN	L	06-11-1963	Dsn Joho Krajan RT. 02 RW. 02	Wiraswasta	3
72.	3324117011560002	KASMINAH	P	30-11-1956	Dsn Joho Krajan RT. 02 RW. 02	Mengurus rumah tangga	1
73.	3324112098000002	NUR KHODI	L	12-09-1980	Dsn Joho Krajan RT. 02 RW. 02	Wiraswasta	1
74.	3324114410790002	KUNIATI	P	04-10-1980	Dsn Joho Krajan RT. 03 RW. 02	Buruh harian lepas	4
75.	3324110311660001	SUPARNO	L	03-11-1966	Dsn Joho Krajan RT. 03 RW. 02	Petani/Pekebun	2
76.	3324112810510001	KAMSARI	L	28-10-1951	Dsn Joho Krajan RT. 03 RW. 02	Wiraswasta	2
77.	3324116505710002	ST AMINAH	P	25-05-1971	Dsn Joho Krajan RT. 03 RW. 02	Petani/Pekebun	3
78.	3324114910550001	TUMINI	P	09-09-1953	Dsn Joho Krajan RT. 03 RW. 02	Petani/Pekebun	1
79.	3324126209040002	NILU ARDIYANI	P	22-09-2004	Dsn Joho Krajan RT. 03 RW. 02	Belum bekerja	2
80.	3324111812830002	PURWANTO	L	18-12-1983	Dsn Joho Krajan RT. 03 RW. 02	Wiraswasta	1
81.	3324110209680003	SYUKUR	L	02-09-1968	Dsn Joho Krajan RT. 03 RW. 02	Petani/Pekebun	1
82.	3324114509640002	KHAIRIYAH	P	05-09-1964	Dsn Joho Krajan RT. 03 RW. 02	Petani/Pekebun	1

NO	NIK	NAMA	JENIS KELAMIN (L / P)	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH KELUARGA
83.	3324110203520001	SUTAMAN	L	02-03-1954	Dsn Joho Krajan RT. 03 RW. 02	Wiraswasta	2
84.	3324113112750002	SUTRIS	L	31-12-1975	Dsn Joho Krajan RT. 03 RW. 02	Wiraswasta	2
85.	3324112007620002	KASUWAN	L	20-07-1962	Dsn Joho Krajan RT. 04 RW. 02	Buruh harian lepas	2
86.	3324114110670005	RUMANAH	P	01-10-1967	Dsn Joho Krajan RT. 04 RW. 02	Petani/Pekebun	1
87.	3324115008670001	KEMINAH	P	10-08-1967	Dsn Joho Krajan RT. 04 RW. 02	Petani/Pekebun	2
88.	3324115910600002	SUKATI	P	19-10-1960	Dsn Joho Krajan RT. 04 RW. 02	Petani/Pekebun	1
89.	3324112903850001	SUPRIYANTO	L	18-04-1985	Dsn Joho Krajan RT. 04 RW. 02	Wiraswasta	3
90.	3324111707550001	SHODIKIN	L	17-07-1955	Dsn Joho Krajan RT. 04 RW. 02	Petani/Pekebun	1
91.	3324111003870001	BERO	L	10-03-1987	Dsn Joho Krajan RT. 04 RW. 02	Wiraswasta	3
92.	3324111005450003	MURI	L	10-05-1945	Dsn Joho Krajan RT. 04 RW. 02	Petani/Pekebun	3
93.	3324115706990004	SITI HARTATIK NUR HIDAYAH	P	17-04-1999	Dsn Joho Krajan RT. 04 RW. 02	Buruh harian lepas	3
94.	3324114210580001	KISWATI	P	02-10-1958	Dsn Joho Krajan RT. 05 RW. 02	Petani/Pekebun	5
95.	3324115006700006	JARIYATUN	P	10-06-1970	Dsn Joho Krajan RT. 05 RW. 02	Wiraswasta	2
96.	3324111110570002	ROHWAN	L	11-10-1957	Dsn Joho Krajan RT. 05 RW. 02	Petani/Pekebun	2
97.	3324110301610001	SUWANDI	L	03-01-1061	Dsn Joho Krajan RT. 05 RW. 02	Petani/Pekebun	3
98.	3324115610560001	KAMSIYAH	P	16-10-1956	Dsn Joho Krajan RT. 05 RW. 02	Petani/Pekebun	2
99.	3324115604620001	MANISIH	P	16-04-1952	Dsn Joho Krajan RT. 05 RW. 02	Petani/Pekebun	2

